

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL DI DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

SKRPSI

Diajukan Untu Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Nama : Rina Hasyim
Nim : 22 2011 062

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL DI DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

SKRPSI



**Nama : Rina Hasyim
Nim : 22 2011 062**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya
Target Penerimaan Retribusi Terminal di Dinas
Perhubungan Di Kota Palembang**
Nama : Rina Hasyim
Nim : 222011062
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program studi : Akuntansi
Mata kuliah pokok : Akuntansi Sektor Publik

**Diterima dan disahkan
Pada tanggal,**

Pembimbing



Ida Zuraidah, Hj., S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0224017201

**Mengetahui
Dekan
u.b ketua prodi studi akuntansi**



Rosalina Ghazali, S.E., AK., M.Si
NIDN/NBM : 022815802/1021961

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rina Hasyim

Nim : 22 2011 062

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah dibuat sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2016

Yang membuat pernyataan,



Rina Hasyim

Moto dan Persembahan

Motto: "Bersabarlah menghadapi ujian, karena sabar adalah kunci menuju kebahagiaan" (Rina Hasyim).

*"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua"
(Aristoteles).*

Persembahan:

- 1. Ayah (hariyadi) dan ibu (sri rahayu) tercinta yang sudah membesarkanku, mendoakanku, mendidiku serta memberikan semangat dalam hidupku.*
- 2. Kakak perempuan ku dan adik perempuan ku(lia hasri dan restia ramadhani) yang sudah memberiku semangat dalam mengerjakan skripsi.*
- 3. Pembimbing Skripsi Ibu Ida Zuraidah, hj. S.E.,Ak, M.Si terima kasih telah memberikan saran dan membantu dalam pembuatan skripsi.*
- 4. Sahabat- sahabatku (ade fitri widyastuti S.E, Fitriani S.E , dwi rospita sari S.E , septi heryani S.E dan geng 8 (ambar, fitria dan ismi)*
- 5. Almamater ku*

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobil alamin, berkat kehadiran Allah SWT peneliti skripsi dengan judul **Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Terminal Di Dinas Perhubungan Kota Palembang** ini dapat penulis selesaikan dengan tepat waktu.

Penelitian laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu peneliti sampaikan terima kasih terutama kepada orang tua tercinta yang do'a dan bantuannya yang memiliki makna besar dalam proses ini. Peneliti juga berterima kasih kepada Ibu **Ida Zuraidah,Hj., S.E,Ak.,M.Si** selaku pembimbing dan juga memberikan masukan serta saran guna dalam penyelesaian skripsi. Selain itu ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Drs. Fauzi ridwan M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Ibu Rosalina Ghazali S.E., A.K., M.Si dan Ibu Welly S.E., A.K., M.Si selaku Ketua Program serta pembimbing akademik dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak dan ibu dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah palembang yang telah meluangkan banyak waktu dalam membantu dan memberikan bantuan moral, spiritual dan material sehingga dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
5. Dinas Perhubungan Kota selaku tempat saya meneliti.
6. Ayah (Hariyadi), Ibu (Sri Rahayu), Kakak Perempuan (Lia Hasri) dan Adik Perempuan (Restia Ramadhani) serta keluarga ku tercinta.²
7. Sahabat-sahabatku (Ade Fitri Widyastuti S.E, Septi Heryani S.E, Fitriani S.E, Dwi Rospita Sari S.E.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Peneliti menyadari, meskipun banyak usaha telah peneliti lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

Wassalamualaiakum Wr. Wb

Palembang, Maret 2016

Rina Hasyim

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PRESEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiii
HALAMAN ABSTRACT.....	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	10
B. Landasan Teori.....	14
BAB III	
METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Operationalisasi Variabel.....	41
D. Data Yang Diperlukan.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Analisis Data	43

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	44
	B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan.....	65
	B. Saran.....	66
Daftar Pustaka		
Lampiran		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. 1 Target dan Realisasi Retribusi Terminal	7
Tabel II. 1 Penelitian Sebelumnya	13
Tabel II. 2 Jumlah Terminal Di Kota Palembang	34
Tabel III. 1 Operasional Variabel	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Jadwal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 2 Fotocopy Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 3 Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skirpsi
- Lampiran 4 Fotocopy Sertifikat Lulus Membaca Dan Hafalan Al- Quran
- Lampiran 5 Fotocopy Sertifikat Komputer
- Lampiran 6 Fotocopy Sertifikat KKN
- Lampiran 7 Fotocopy Sertifikat Lulus Toefl
- Lampiran 8 Biodata Penulis

ABSTRAK

Rina Hasyim/222011062/2016/Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Terminal Di Dinas Perhubungan Kot Palembang/Akuntansi Sektor Publik

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi Terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi terminal di kota Palembang adalah banyaknya bus/trevel AKAP dan AKDP yang menaik turunkan penumpang diluar terminal dan makin menjamurnya trevel gelap.

Kata kunci : penerimaan retribusi terminal

ABSTRACT

RinaHasyim / 222011062/2016 / The Analysis of Causative Factors Unreachable Target of the Acceptance Terminal Levies in Department of Transportation Palembang/ Public Sector Accounting.

The problem of this study was what factors were causing there was the unreachable target of terminal levies at Department of Transportation Palembang. The objective of this study was to find out the factors were causing that there was the unreachable target of terminal levies at Department of Transportation Palembang.

This study was conducted at the Department of Transportation Palembang. This study was descriptive study. The data used in this study was secondary data. The techniques for collecting the data were interviews and documentation. The technique for analyzing the data used was qualitative analysis.

The results showed, the causative factors were causing that there was the unreachable target of terminal levies in Palembang city was the number of bus / travel of AKAP and AKDP which ascending lowering passenger outside the terminal and the growing proliferation of illegal travel.

Keywords: *acceptance of the terminal levies*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsipdasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan masyarakat memang menjadi tujuan utama dari kebijakan otonomi sebagaimana tuntutan pada saat reformasi digulirkan. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Otonomi daerah yang telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang melandasinya, mulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah provinsi atau kabupaten oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 12 tahun 2008, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten atau kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pada era ini otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan

pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk menyelenggarakan pemerintah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah, Undang- Undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber pendapatan daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Siahaan,2010 :1).

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam Bab V Pasal 6 yang kemudian diperbarui melaluia ditetapkannya Undang-Undang Tahun 2007 dalam Bab IV Pasal 5 mengemukakan sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan

Asli Daerahselanjutnya disebut (PAD) yaitu ; Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelohan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah diatur dalam Undang – Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah (PERDA). Dalam hal ini, Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagai upaya-upaya untuk mengintensifikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang yang merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga dalam rangka melaksanakannya menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten atau Kota mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerahnya yang antara lain berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya adalah retribusi terminal yang termasuk dalam retribusi daerah.

Retribusi terminal merupakan salah satu Retribusi Daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan karena semakin banyak masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi khususnya transportasi darat untuk menunjang segala kegiatan dan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, banyak perusahaan jasa transportasi darat berlomba-lomba menawarkan jasa transportasinya dengan segala macam fasilitas yang diberikan untuk menarik minat masyarakat. Contoh

sarana transportasi darat adalah bus umum, angkutan kota, taksi dan lain-lain. Retribusi Terminal diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi.

Keberhasilan dari Retribusi Terminal sudah barang tentu banyak bergantung dari beberapa hal atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan Retribusi Terminal tersebut dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan dari penerimaan Retribusi Terminal, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Terminal, maka tercapainya target penerimaan Retribusi akan ditentukan oleh sejauhmana usaha yang dilakukan pemerintah daerah itu dengan cara intensif dan baik, maka apa yang diharapkan dapat terwujud. Sebaliknya apabila tidak dilakukan secara intensif atau kurang mendapatkan perhatian dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut, maka penerimaan Retribusi terminal tidak akan tercapainya sebagaimana yang diharapkan. Apabila penerimaan pendapatan daerah tinggi, maka perencanaan dan pengembangannya tersebut berarti membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula, dimana biaya ini diperoleh dari pendapatan daerah termasuk didalamnya Retribusi terminal (Syaripuddin, 2010 :2).

Dinas Perhubungan kota Palembang memungut dan mengelola retribusi terminal dalam upaya meningkatkan pembangunan daerahnya. Retribusi terminal merupakan yang paling penting tetapi juga merupakan

elemen yang dipengaruhi faktor ketidak pastian terbesar. Oleh karena itu dalam menyusun target retribusi terminal harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target retribusi terminal, antara lain: Faktor internal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat didalam badan usaha pemerintah, faktor-faktor tersebut antara lain: Data pendapatan pada tahun-tahun yang lalu, Koordinasi dan Kemampuan Personil, Analisis dan Pengawasan, Lemahnya Proses Rekrutmen Karyawan, Manajemen keuangan yang tidak akuntabel dan transparan, sedangkan Faktor eksternal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat diluar tetapi di sana mempunyai pengaruh terhadap anggaran pendapatan retribusi terminal, antara lain: Kesadaran Wajib Retribusi, Kondisi Objek Penerimaan dan Minimnya kesadaran terhadap peraturan dan tata tertib terminal.

Anggaran pendapatan sebagai alat bantu manajemen, sangat berperan sebagai standar kinerja untuk mengevaluasi atau membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Penyimpangan yang telah terjadi dianalisa untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut sekaligus dapat digunakan sebagai motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja.

Dinas perhubungan kota Palembang mempunyai prospek yang cukup baik dalam mengelola retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena semakin meningkatnya pembangunan tersebut berarti membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula, biaya ini diperoleh dari

pendapatan daerah termasuk didalamnya retribusi terminal. Dalam pungutan Retribusi pemerintah Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak lepas dari masalah yang merupakan penghambat dalam pemungutan Retribusi tersebut. Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal di Kota Palembang belum terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan retribusi terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang belum memenuhi target seperti yang diharapkan.

Hal ini dapat dilihat dari tabel target dan terealisasi pendapatan sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel I.1
Target dan Realisasi Retribusi Terminal Kota Palembang di Dinas Perhubungan kota Selama Periode Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2011	Rp. 2.625.000.000	Rp. 1.569.777.000	59,80%
2012	Rp. 2.625.000.000	Rp. 2.121.309.000	80,81%
2013	Rp. 2.334.000.000	Rp. 2.072.792.000	88,81%
2014	Rp. 2.450.700.000	Rp. 2.310224.750	94,27%
2015	Rp.2.450.700.000	Rp. 1.356.537.000	55,35%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2011-2015 realisasi retribusi terminal di kota palembang tidak pernah memenuhi target, tetapi pada tahun 2012-2014 realisasi penerimaanya meningkat meskipun masih belum memenuhi target dan tahun 2014 ke 2015 realisasi retribusi terminal di Kota Palembang mengalami penurunan sebesar 38,92%. Dengan demikian perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak dari unsur

pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan Retribusi Terminal yang betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Adapun permasalahan dan kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi terminal adalah adanya bus/travel AKDP dan AKAP yang menaik turunkan penumpang diluar terminal, menurunnya angkutan darat akibat persaingan tarif dengan moda lain dan munculnya terminal bayangan yang diback up oleh preman/aparat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan Kota Palembang.



D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui faktor – faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi terminal.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan mengenai faktor – faktor tidak tercapainya retribusi terminal.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadian acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang dan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang sifatnya sejenis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan Dwi Rospita Sari (2015) yang berjudul Pengaruh Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Rumusan masalah faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Pajak Sarang Burung Walet pada DISPENDA Kota Palembang? Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Palembang? Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Pajak Sarang Burung Walet pada DISPENDA Kota Palembang. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh melalui jurnal, data dari sumber dan peneliti terdahulu. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet pada dinas pendapatan daerah kota palembang adalah Faktor Intenal dan Faktor Eksternal .

Penelitian yang dilakukan oleh Lisza Okctarini (2013) yang berjudul Analisis Faktor – faktor yang Meyebabkan Tidak Tercapainya Taerget Retribusi Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Rumusan masalah faktor – faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi daerah? Tujuannya untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya taerget retribusi daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data target retribusi daerah. Teknik pengumpulan data adalah metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya taerget retribusi daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Faktor Penyebab Langsung dan Faktor Penyebab Tidak Langsung .

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syauckani (2011) yang berjudul Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Rumusan masalah berapa besar pengaruh penerimaan retribusi daerah? Tujuannya untuk mengetahui besarnya pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Timur. Teknik pengumpulan data adalah metode wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan

3	Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. (Ahmad Syaukani: 2011)	Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten ogan komering ulu timur tidak ada pengaruh yang signifikan antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)	Sama-sama menganalisis tentang penerimaan retribusi dalam meningkatkan pendapatan. Jenis data yang digunakan adalah metode pengumpulan data sama.	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada tempat penelitian yang diteliti.
---	--	--	---	---

Sumber: Peneliti 2015

B. Landasan Teori

1. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduk secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikaitkan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati jasa dari negara (Siahaan, 2013:5).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b. Jenis – Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi:

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis – jenis retribusi daerah jasa umum, yaitu:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b) Retribusi Jasa Usaha

Jasa usaha yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis – jenis retribusi jasa usaha, yaitu:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

10) Retribusi Penyeberangan di Air

11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c) Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Jenis – jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu:

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

3) Retribusi Izin Gangguan

4) Retribusi Izin Trayek

5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

c. Sifat – sifat Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dalam pelaksanaannya mempunyai sifat-sifat yaitu:

1. Retribusi yang sifatnya umum

Maksudnya bahwa pungutan mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, misalnya bagi mereka yang masuk kedalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan retribusi daerah.

2. Retribusi yang pungutannya bertujuan

Maksudnya adalah retribusi yang dilihat dari segi pemakainnya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat data kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan akte kelahiran.

d. Ciri – Ciri Retribusi Daerah

Ciri-ciri retribusi adalah sebagai berikut (Siahaan, 2013:7):

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang – Undang Peraturan Daerah (Perda).
2. Hasil penerimaan retribusi masuk kas pemerintah daerah
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontrak prestasi

atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atau pembayaran yang dilakukannya.

4. Retribusi terhutang apabila ada jasa – jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan retribusi daerah adalah secara ekonomi, yaitu jika tidak membayar retribusi maka tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

e. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif

UU Nomer 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa prinsip dan sasaran penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

- 1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- 2) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

f. Tata Cara Pemungutan Retribusi

UU Nomer 28 Tahun 2009 tata cara pemungutan retribusi, yaitu:

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan
- 2) Dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- 3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tetap pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- 4) Penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- 5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

g. Cara Perhitungan retribusi

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan

jasa. Dengan demikian , besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

1. Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, beberapakali/beberapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

2. Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau

kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan.

3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

h. Saran dan tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh berkerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak berkerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya laya dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerja samakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan

penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

i. Cara Penetapan Tarif Retribusi

UU Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa cara penetapan tarif retribusi, yaitu besarnya retribusi yang harus dibayar terhutang oleh orang pribadi atau badan menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antaran tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi yang dihitung berdasarkan:

- 1) Tingkat Penggunaan Jasa
- 2) Tarif Retribusi

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siahaan, 2008:14).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi – potensi yang ada di daerah serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

b. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdulah Halim (2012) Sumber-sumber Pendapatan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan hasil pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan bagian dari keuntungan bersih perusahaan daerah baik bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Selain itu, terdapat pula dana perimbangan yaitu bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tabah dan Bangunan (BPATB), penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemudian sumber pendapatan daerah lainnya adalah pinjaman daerah meliputi pinjaman dari dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Terakhir yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten /kota lainnya.

c. Kriteria Penilaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdulah Halim (2012) kriteria penilaian Pendapatan Daerah (PAD) meliputi:

1. Kriteria hasil (*yield*) yang bisa diuraikan sebagai berikut:
 - a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak/retribusi dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya.
 - b. Stabilitas dan mudah tidaknya mempekirakan besarnya hasil itu.
 - c. Elastisitas hasil pajak/retribusi terhadap inflansi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya.
 - d. Perbandingan hasil pajak/retribusi dengan biaya pungut.
2. Kriteria keadilan (*equity*) dasar dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang.
 - a. Pajak/retribusi harus adil secara horizontal artinya beban pajak/retribusi haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.
 - b. Harus adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi.
 - c. Pajak/retribusi itu haruslah adil dari tempat ketempat artinya hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan

sewenang-wenang dalam pajak/retribusi dari satu daerah ke daerah lain kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Kriteria daya guba ekonomi (*Economic Efficiency*) pendapatan asli daerah hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai konsumen dan pilihan produsen menjadi salah satu arah atau orang menjadi sgan berkerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak/retribusi.
4. Kriteria kemampuan melaksanakan (*Ability To Implement*), suatu pajak/retribusi haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kriteria kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability As A Local Revenue Souice*) : haruslah jelas pada daerah dimana suatu pajak/retribusi harus dibayarkan dan memungut pajak sedapat mungkinsama dengan tempat akhir beban pajak/retribusi.

3. Retribusi Terminal

a. Pengertian Retribusi Terminal

Retribusi terminal adalah pungutan pembayaran yang dikenakan terhadap setiap kendaraan umum yang memasuki Terminal dan

menikmati jasa pelayanan dalam Terminal berupa tempat parkir, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal berupa jalur kedatangan, jalur pemberangkatan, tempat tunggu kendaraan, tempat istirahat kendaraan, tempat tunggu penumpang serta tersedianya fasilitas utama lainnya dan fasilitas penunjang yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Terminal, adalah salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota dibidang Retribusi, jenis Retribusi Jasa Usaha. Retribusi terminal sebagai salah satu bidang retribusi jenis Retribusi Jasa Usaha ada karena adanya Sistem Pemerintahan Daerah yang berasaskan Desentralisasi yang mewujudkan daerah Otonom dengan Hak Otonomi Daerah. Retribusi Terminal harus diatur dengan Peraturan Daerah dan tidak boleh berlaku surut.

Retribusi Terminal adalah jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi/badan yang memakai jasa layanan terminal yang menyelenggarakan angkutan orang/barang dengan kendaraan umum (Syaripuddin, 2010:34). Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 objek retribusi terminal adalah pelayanan terminal yang disediakan pemerintah daerah kepada setiap pengguna jasa layanan terminal, berupa:

1. Pelayanan Parkir Kendaraan Umum.
2. Tempat Kegiatan Usaha.

3. Fasilitas lainnya di Lingkungan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah seluruh sopir yang memakai jasa usaha terminal meliputi sopir angkutan kota dan sopir bis. Retribusi terminal merupakan jenis retribusi jasa usaha. Retribusi terminal dapat dikenakan oleh pengguna jasa layanan terminal yang ada di Kabupaten/Desa. Adapun tingkat tarif yang dikenakan retribusi yaitu semua jenis angkutan dikenakan tarif Rp. 2000/mobil.

Dalam hal Retribusi Terminal ini terdapat yang namanya pelayanan terminal yang merupakan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dikelola oleh Pemerintah Daerah.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Terminal

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Terminal pasal 152, 153, 155 dan 160 tentang Tata Laksana Pengelolaan Terminal meliputi:

a. Pasal 152

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
4. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

b. Pasal 153

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

c. Pasal 155

1. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
2. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

3. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

d. Pasal 160

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
3. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tetap pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
4. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
5. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

c. Tugas dan Fungsi Seksi Terminal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 16 Tahun 2011 maka tugas seksi terminal adalah melaksanakan perencanaan, penetapan dan koordinasi pembangunan terminal, sedangkan fungsinya meliputi:

1. Perencanaan, pembangunan dan penetapan lokasi terminal serta pengelolaan terminal baik terminal penumpang maupun terminal barang.
2. Perencanaan dan penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C
3. Perencanaan, pembangunan pengoperasian terminal Tipe A, Tipe B dan Tipe C.
4. Perencanaan, pembangunan terminal angkutan barang
5. Perencanaan, pengoperasian terminal angkutan barang
6. Pengawasan pemungutan retribusi terminal

d. Fungsi Terminal

Terminal adalah titik simpul berbagai moda angkutan, sebagai titik perpindahan penumpang dari moda satu ke moda yang lain atau dari berbagai moda ke suatu moda, juga suatu titik tujuan atau titik akhir orang setelah turun melanjutkan berjalan kaki ke tempat kerja, rumah atau pasar, dengan kata lain Terminal adalah suatu titik henti. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dalam buku Menuju lalu-lintas dan Angkutan jalan yang tertib (edisi yang disempurnakan) pada BAB IX tentang transportasi jalan halaman 93, menyatakan fungsi Terminal transportasi jalan dapat ditinjau dari 3 unsur, adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Terminal bagi Penumpang (user), adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari suatu moda atau

kendaraan ke moda atau kendaraan lain, tempat fasilitas-fasilitas informasi dan fasilitas parkir kendaraan pribadi.

2. Fungsi Terminal bagi pengusaha dan pengemudi (operator) adalah untuk pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan.
3. Fungsi Terminal bagi pemerintah (regulator), adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu-lintas untuk menata lalu-lintas dan angkutan serta menghindari dari kemacetan, sumber pemungutan restribusi dan sebagai pengendali kendaraan angkutan umum.

e. Jenis-jenis Terminal

Jenis-jenis terminal yang ada dikota Palembang sebanyak 9buah terdiri dari:

1) Type A sebanyak 2

- UPTD Terminal Karya Jaya
- UPTD Terminal Alang-Alang Lebar

2) Type B sebanyak 2

- UPTD Terminal Jakabaring
- UPTD Terminal Plaju

3) Type C sebanyak 5

- UPTD Terminal Sako
- UPTD Terminal Lembang
- UPTD Terminal Ampera
- UPTD Terminal 7 Ulu
- UPTD Terminal Tangga Buntung

Tabel II.2
Data Terminal Di Kota Palembang Tahun 2015

No	Nama Terminal	Tipe	Luas (m^2)	Instansi Pengelola	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Alang-Alang Lebar	A	8.000	Dishub PLG	
2.	Karya Jaya	A	18.000	Dishub PLG	
3.	Jaka Baring	B	8.000	Dishub PLG	
4.	Plaju	B	3.750	Dishub PLG	
5.	Sako Kenten	C	2.400	Dishub PLG	
6.	Lemabang	C	1.600	Dishub PLG	
7.	Ampera	C	1.800	Dishub PLG	
8.	7 Ulu	C	820	Dishub PLG	
9.	Tangga Buntung	C	780	Dishub PLG	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2015

f. **Objek Retribusi Terminal**

Objek retribusi menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2011 pasal 4 adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :

a. Terminal Penumpang:

1. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan, menurunkan penumpang umum, dan selama menunggu keberangkatan.

2. Jasa penggunaan fasilitas terminal.

3. Jasa penggunaan fasilitas terminal oleh pelaku usaha lainnya.

b. Terminal Barang:

1. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkarmuat.

2. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan.

3. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan selain kendaraan angkutan barang.

4. Jasa penggunaan fasilitas terminal oleh pelaku usaha lainnya.

g. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

Berdasarkan perda No. 1 Tahun 2012 Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

1. Retribusi Terminal

No	Jenis Kendaraan	Tarif Per Kendaraan
1	Bus Antar Kota Antar propinsi	Rp. 2.000,- (sekali masuk)
2	Bus Antar Kota Dalam Propinsi	Rp. 1000,- (sekali masuk)
3	Angkutan Kota/Angkudes	Rp. 500,- (sekali masuk)

2. Retribusi Tempat Kegiatan Usaha

No	Jenis Retribusi	Retribusi (M2/bulan)
1	Terminal Type B	
	Pedagang Menetap	
	- Kios	Rp. 9.750,-
	- Los	Rp. 3.750,-
	Pedagang Tidak Menetap	Rp. 1000,- / hari

2	Terminal Type C	
	Pedagang Menetap	
	- Kios	Rp. 3.500,-
	- Los	Rp. 1.500,-
	Pedagang Tidak Menetap	Rp. 1.000,- / hari

3. Retribusi MCK

No	Jenis Retribusi	Retribusi/sekali
1	Buang Air kecil	Rp. 1000,-
2	Buang Air Besar	Rp. 1000,-
3	Mandi	Rp. 2000,-

4. Retribusi Parkir di Dalam Terminal

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (/ Hari)
1	Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 1000,-
2	Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 1000,-
3	Atau lebih	Rp. 2000,-

5. Tarif retribusi ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua)

jam

6. Apabila parkir lebih dari 1 (dua) jam, besarnya retribusi ditetapkan

dua kali tarif dimaksud

7. Dalam hal ada kegiatan keramaian umum atau kegiatan yang

berisifat insidental, maka tarif ditetapkan dua kali tarif dimaksud.

4. Faktor – faktor yang Menyebabkan tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Terminal

Faktor penyebab belum optimalnya retribusi terminal sebagai salah satu sumber PAD dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Faktor internal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat didalam, faktor-faktor tersebut antara lain:
 - a. Data Awal
 - b. Analisis dan Pengawasan.
 - c. Lemahnya Proses Rekrutmen Karyawan
 - d. Manajemen keuangan yang tidak akuntabel dan transparan.
2. Faktor eksternal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat diluar tetapi di sana mempunyai pengaruh terhadap anggaran pendapatan retribusi terminal, antara lain:
 - a. Kesadaran Wajib Retribusi
 - b. Kondisi Objek Penerimaan
 - c. Minimnya kesadaran terhadap peraturan dan tata tertib terminal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi sugiyono (2013: 11), yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel satu atau lebih tanpa membandingkan atau hubungan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan satu variabel atau lebih tetapi untuk sampel yang lebih dari satu.

3. Penelitian Asosiatif atau Hubungan

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dan upaya meningkatkan penerimaan retribusi terminal di Kota Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Kantor Dinas Perhubungan
Jl. Pangeran sido ing lutan 35 ilir Palembang. Telepon +62711441175
Website: www.Dishubkominfo.sumselprov.go.id

C. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan operasionalisasi variabel yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Faktor Internal	Faktor internal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat didalam instansi pemerintah itu sendiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Awal 2. Analisis dan Pengawasan. 3. Lemahnya Proses Rekrutmen Karyawan 4. Manajemen keuangan yang tidak akuntabel dan transparan.
Faktor Eksternal	Faktor eksternal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat diluar tetapi di sana mempunyai pengaruh terhadap anggaran pendapatan retribusi terminal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Retribusi. 2. Kondisi Objek Penerimaan. 3. Minimnya kesadaran terhadap peraturan dan tata tertib.

Sumber: Peneliti 2015

D. Data Yang Diperlukan

Nur dan Bambang (2009: 146) data penelitian terdiri dari, yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media prantara).

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)

Ada pun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang melakukan wawancara dari sumber secara langsung dan data sekunder yang merupakan laporan target dan realisasi Retribusi Daerah tahun 2011 – 2015

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2013: 156 – 168) teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak – pihak yang dianggap dapat memberikan data dan informasi.

3. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) yaitu cara mengumpulkan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan bukti – bukti dan keterangan

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Analisis data Nur dan Bambang (2009: 12) terdiri dari, yaitu:

1. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu analisis yang menekankan pada pengujian teori – teori melalui pengukuran variabel – variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

2. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif yaitu analisis yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah – masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang hipotesis, kompleks dan rinci.

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara menguraikan faktor – faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi

terminal dan bagaimana cara untuk meningkatkan penerimaan retribusi terminal di kota Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang

Dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak serta merta diikuti perubahan Instasional, melainkan tahapan-tahapan Instasional yakni berawal dari terbentuknya Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Palembang I berubah menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Wilayah I, berubah lagi menjadi cabang Dinas I Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat II Kodya Palembang. Setelah berlakunya undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pemerintah tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan Angkutan Jalan kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Untuk kelancaran administrasi, setelah dikeluarkannya peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja Dinas LLAJ Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, pada tanggal 26 Maret 1996 cabang Dinas I LLAJ Tingkat Kodya Palembang oleh Walikota Palembang berubah menjadi Dinas LLAJ Kotamadya Tingkat II Palembang yang keberadaanya dibawah Pemerintah Daerah Kodya Tingkat II Palembang. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Otonomi Daerah, berubah istilah menjadi Dinas LLAJ Kota Palembang, dan pada bulan Mei Tahun 2001 menjadi Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dinas Perhubungan Kota Palembang dipimpin oleh kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang.

Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang lalu lintas, angkutan jalan, serta tugas yang lain diberikan oleh pemerintah daerah provinsi, untuk tugas tersebut Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Perhubungan.
- c. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota Palembang.

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang

a. Visi :

Terwujudnya pelayanan perhubungan yang berkualitas dalam rangka menuju Palembang Kota International.

b. Misi :

- a. Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyedia dan pengguna jasa perhubungan Kota Palembang.
- b. Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan yang lebih berkualitas.

3. Pembagian Tugas dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang

1) Kepala Dinas

a. Tugas

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang perhubungan.

b. Fungsi

- 1) Melaksanakan sebagian tujuan walikota di bidang perhubungan.
- 2) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- 3) Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan.
- 4) Mengelola urusan ketatausahaan dinas.
- 5) Membina unit pelaksana Teknis Dinas.
- 6) Melaksanakan penegakan hukum di bidang perhubungan.

2) Sekretaris Dinas

a. Tugas

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, hukum dan humas serta urusan umum.

b. Fungsi

1) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

2) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

3) Melaksanakan pengelolaan administrasi hukum dan humas.

3) Subbag Umum

Bertugas mengurus surat menyurat dan mengelola arsip.

4) Subbag Kepegawaian

Bertugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian.

5) Subbag Keuangan

Bertugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

6) Kepala Bidang Transportasi Jalan dan Rel

a. Tugas

Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas, teknis secara transportasi jalan dan rel.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas.
 - 2) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana transportasi jalan dan rel.
 - 3) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana LLAJ.
 - 4) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan angkutan di bidang transportasi jalan dan rel.
- 7) Seksi Sarana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- Bertugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendiri bengkel umum, serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- 8) Seksi Angkutan Jalan
- Bertugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan trayek angkutan jalan, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan dan bahan pembinaan pelaksanaan angkutan.

9) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penetapan dan penyediaan prasarana jalan dan rel serta bahan pemantauan dan analisis kinerja prasarana jalan dan rel.

10) Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ASDP

1) Tugas

Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perhubungan Taut serta lalu lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

2) Fungsi

a) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Lalu Lintas Laut dan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyebrangan.

b) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan untuk menunjang keselamatan Lalu Lintas Laut dan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyebrangan.

11) Seksi Sarana dan Manajemen Lalu Lintas Laut dan Sungai

Bertugas menyiapkan bahan pembinaan, inventarisasi serta pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

12) Seksi Angkutan Laut dan Sungai

Bertugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan trayek angkutan sungai, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan dan bahan pembinaan pelaksanaan.

13) Seksi Prasarana Laut dan Sungai

Bertugas menyiapkan bahan pembinaan, inventarisasi serta pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan taut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

14) Kepala Bidang Perencanaan dan Udara

1) Tugas

Melaksanakan pengumpulan data dan info dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja, melakukan pemantauan dan pengendalian pengawasan serta evaluasi pelaporan serta kegiatan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

2) Fungsi

- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- b) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi, pelaporan kegiatan dan mengola retribusi dibidang perhubungan.

15) Seksi Program

Bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang perhubungan.

16) Seksi Evaluasi dan Penyuluhan

Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan serta kegiatan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, serta pembinaan dan pemberian bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat dibidang perhubungan.

17) Seksi Angkutan Udara

Bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam Bandar udara dan pemberian izin lokasi Bandar udara serta melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan IMB bagi bangunan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, serta pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan angkutan udara.

18) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kota

1) Tugas

Melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan,

Angkutan Jalan Rel, Udara, Pos dan Telekomunikasi serta menyiapkan bimbingan keselamatan dan penerbitan pada sektor perhubungan

2) Fungsi

- a) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Angkutan Jalan Rel, Udara, Pos dan Telekomunikasi.
- b) Penyusunan rencana pembinaan, keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Angkutan Jalan Rel, Udara, Pos dan Telekomunikasi.
- c) Penyusunan rencana pembinaan dan pelaksanaan kegiatan patroli, pengawalan dan penegakan hukum dibidang perhubungan.

19) Seksi Patroli dan Pengawalan Kota

Bertugas melaksanakan patrol dan pengawalan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP).

20) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kota

Bertugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Laut, Angkutan Jalan Rel, Udara, Pos dan Telekomunikasi.

21) Seksi Penyidikan dan Penindakan Kota

Bertugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor, penyidikan dan penindakan tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan.

22) Unit Pelaksana Teknis Dinas

1) Tugas

Melaksanakan Sebagian tugas Dinas, disatu/beberapa wilayah kecamatan dalam suatu daerah.

2) Fungsi

Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai bidangnya, melaksanakan urusan administrasi.

4. Kepegawaiaan

a. Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Palembang sebanyak 208 orang.

b. Tenaga Honorarium Oprasional

Jumlah tenaga honorarium oprasional pada Dinas Perhubungan Kota Palembang sebanyak 82 orang terdiri dari 71 orang pria dan 11 wanita. Tenaga honorarium oprasional diangkat berdasarkan keputusan

Walikota Palembang, terutama untuk mengisi kebutuhan tenaga oprasional di lapangan dan dananya disediakan APBD Kota Palembang.

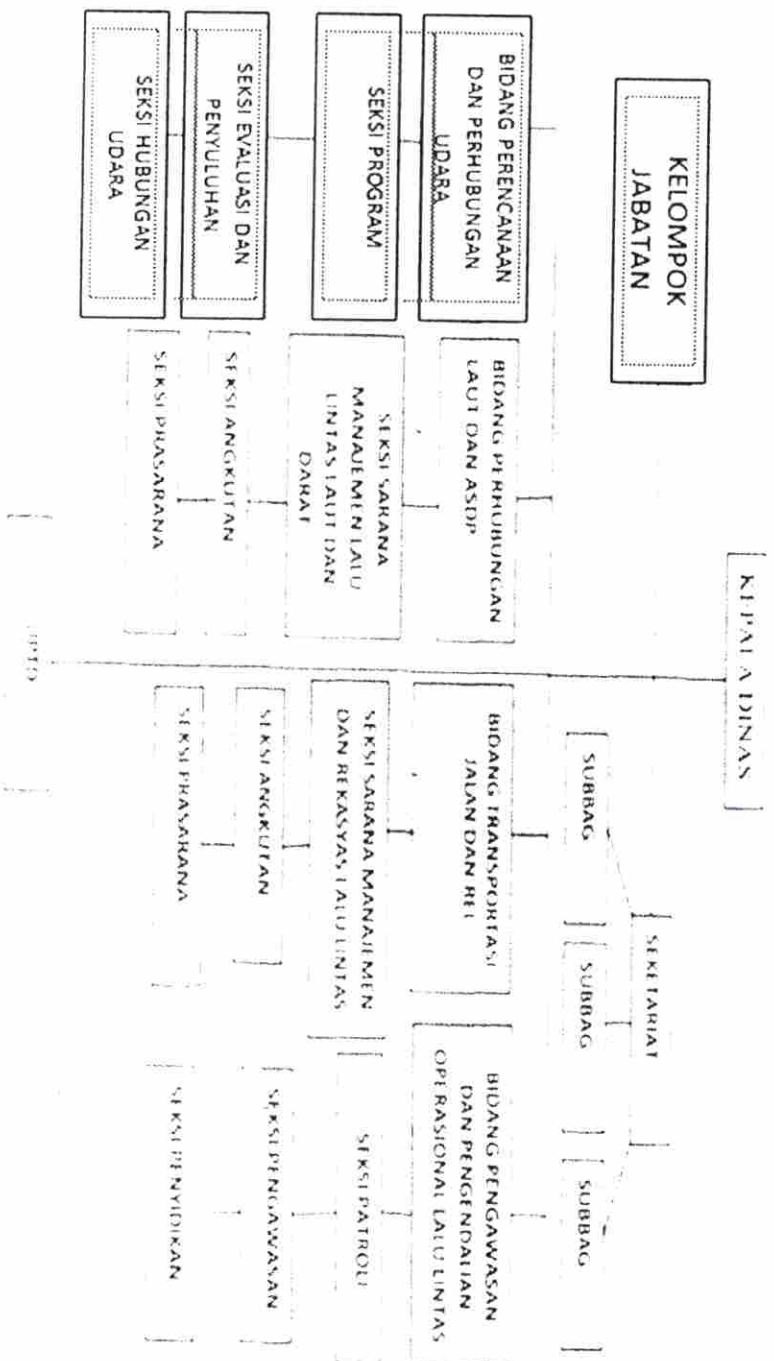
c. Tenaga Honorarium Cleaning service, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Kolektor

Jumlah tenaga honorarium cleaning service pada Dinas Perhubungan Kota Palembang sebanyak 59 orang. Tenaga honorarium diangkat berdasarkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang terutama untuk mengisi kebutuhan tenaga jaga malam, dan kebersihan, dananya disediakan dalam APBD.

Jumlah Honorarium Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perhubungan Kota Palembang sebanyak 66 orang. Jumlah Honorarium Kolektor pada Dinas Perhubungan Kota Palembang sebanyak 10 orang.

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang dapat dilihat pada gambar IV.1 berikut:

Gambar IV.1
 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang



Sumber : Pengelola Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2016

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Terminal Di Dinas Perhubungan Kota Palembang

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi terminal adalah adanya bus/trevel AKDP dan AKAP yang menaik turunkan penumpang diluar terminal, menurunnya jumlah angkutan darat akibat persaingan tarif dengan moda lain dan munculnya terminal bayangan yang diback up oleh preman/aparat. Dalam melaksanakan pekerjaan, manusia sering menemukan hambatan atau kendala yang dihadapi untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Demikian juga dengan Kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam melaksanakan penetapan target untuk mencapai penerimaan retribusi terminal di kota palembang yang telah ditetapkan ada beberapa kendala-kendala yang ditemukan. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan target retribusi terminal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1. Data Dasar

Dari hasil wawancara denagan salah satu staf petugas LLAJ (lalulintas dan angkutan) dan Perkeretaapian menyatakan bahwa data dasar yang diambil oleh dinas perhubungan kota palembang berupa data awal dari data target dan realisasi yang ada diaturan undang-undang dan peraturan pemerintah. Data dasar dalam retribusi terminal

yaitu Peraturan Daerah no. 28 Tahun 2009. Berikut data target dan realisasi retribusi terminal kota Palembang :

**Target dan Realisasi Retribusi Terminal Kota Palembang di Dinas
Perhubungan kota Selama Periode Tahun 2011-2015**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2011	Rp. 2.625.000.000	Rp. 1.569.777.000	59,80%
2012	Rp. 2.625.000.000	Rp. 2.121.309.000	80,81%
2013	Rp. 2.334.000.000	Rp. 2.072.792.000	88,81%
2014	Rp. 2.450.700.000	Rp. 2.310224.750	94,27%
2015	Rp.2.450.700.000	Rp. 1.356.537.000	55,35%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2011-2015 realisasi retribusi terminal di kota Palembang tidak pernah memenuhi target, pada tahun 2012-2014 realisasi penerimaannya meningkat meskipun masih belum memenuhi target . Tahun 2014 ke 2015 realisasi retribusi terminal di Kota Palembang mengalami penurunan sebesar 38,92%, dengan demikian perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak dari unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan Retribusi Terminal yang betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Menurut analisis, untuk menentukan besarnya target penerimaan retribusi terminal tidak hanya melihat dari target dan realisasi, tetapi juga harus melihat keadaan lokasi terminal yang ada di Kota Palembang, apabila keadaan lokasi penerimaan retribusi terminal baik dan masih banyak objek-objek penerimaan retribusi terminal maka pemerintah dapat menaikkan target dan realisasi

pendapatan retribusi terminal, tetapi apabila lokasi penerimaan retribusi terminal telah lama tidak diurus dan kurangnya objek-objek penerimaan retribusi terminal yang akan diambil, seharusnya pemerintah tidak menaikkan target dan penerimaan retribusi terminal.

2. Analisis dan Pengawasan

Seperti yang dilontarkan salah satu staf petugas LLAJ (lalulintas dan angkutan) dan Perkeretaapian kota Palembang selain penetapan target yang terlalu besar, kurangnya petugas juga menjadi kendala dalam menerapkan peluang-peluang yang dapat ditarik retribusinya. Selain target yang terlalu besar, kesadaran masyarakat dan kurangnya personil adalah kendala dalam memenuhi target, seperti yang terjadi pada retribusi terminal kendaraan umum yang seharusnya masuk ke terminal justru memilih kucing-kucingan dengan petugas. Dalam melakukan pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh koordinator pemungutan retribusi terminal dan Tim Pengawas langsung meninjau pelaksanaan pemungutan di Lapangan. Seperti yang dijelaskan oleh Koordinator Pemungutan Retribusi Terminal bahwa :

“Setiap hari para koordinator bidang mengawasi anggota-anggotanya. Termasuk koordinator retribusi terminal namun pengawasan yang dilakukan oleh koordinator retribusi terminal belum optimal, karena dia harus mengawasi 2 tempat pemungutan yaitu terminal regional dan terminal pembantu ”.

Selain itu ia menambahkan bahwa :

“ Untuk melakukan pengawasan kepada para petugas maka selalu dilakukan pengecekan terhadap karcis setiap selesai pemungutan retribusi retribusi terminal, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui petugas mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari jumlah setoran pungutan retribusi.”

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Koordinator Pemungutan Retribusi Terminal sebagai penanggungjawab penerimaan retribusi terminal setiap hari turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi terminal di Kota Palembang, untuk pemberian sanksi kepada para pemungut retribusi terminal yang lalai melaksanakan tugasnya serta para sopir yang melakukan pelanggaran dijelaskan oleh Kabid Perhubungan Darat bahwa :

“Untuk para petugas dan para sopir yang melakukan kesalahan, kami hanya memberikan pengarahan agar tidak mengulangi kesalahannya, namun untuk pemberian sanksi yang lebih tegas belum ada diperaturan daerah, sehingga kami hanya memberikan pengarahan saja”

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh petugas pemungut retribusi Darni yaitu:

“Iya betul, kami tidak pernah diberi sanksi yang berat apabila melakukan pelanggaran. Sebenarnya ada tapi itu hanya pengarahan saja. Sehingga masih banyak para petugas dan sopir yang mengulangi kesalahannya, yang saya baca pada Perda Nomor 5 Tahun 2010, tidak ada dicantumkan tentang pemberian sanksi kepada para petugas dan sopir yang melakukan pelanggaran”

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa para petugas pemungut retribusi dan para sopir mobil yang selalu melakukan pelanggaran karena pengawasan yang diberikan belum efektif, apalagi belum ada Perda yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi para petugas dan para sopir yang melakukan pelanggaran sehingga mereka belum jera melakukan pelanggaran.

Sedangkan hasil obeservasi langsung yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa setiap hari koordinator pemungutan retribusi terminal datang setiap pagi keterminal regional, namun pada jam 11.00 dia mengawas di terminal pembantu. Penulis juga melihat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh sopir angkutan, namun yang penulis lihat sopir yang melakukan pelanggaran tersebut diberi karcis dengan tarif normal yaitu 2000 rupiah namun yang disetor sopir tersebut sebanyak 5000 rupiah.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Sahrul selaku sopir angkutan daerah yang melanggar :

“ Tidak dimarahijaki kalau kita melanggar yang jelasnya ada pembeli gula-gula dikasi itu petugasnya. Dari pada masuk keterminal regional yang rusak jalannya mending langsung lurus saja, tapi kalau sering-sering juga ambil jalur lurus biasanya tidak terima alasan dia suruhki lagi putar balik dan masuk keterminal regional”

Namun Hamli selaku petugas pemungut retribusi mengatakan bahwa :

“ bias saja saya marahi kalau ada sopir yang langsung jalur lurus, tapi kalau di marahi juga dia terlalu banyak alasannya apa lagi kalau orang sakit dia bawa, langsungji saja tidak bayar retribusi. Tapi kalau sering-sering biasanya disuruh lagi putar balik dan masuk keterminal regional”

Dari hasil penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa ketegasan seorang petugas dalam memungut retribusi terminal harus lebih tegas, agar para objek retribusi terminal tidak selalu melakukan pelanggaran, karena pengawasan merupakan tingkatan management yang meliputi kegiatan, pengujian dan pemantauan serta kunjungan staf untuk menjaga tugas pokok dan fungsi departemen dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Agar berdaya guna, berhasil guna dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan perencanaan ditetapkan sehingga kegiatan dan tujuan organisasi dapat tercapai.

3. Lemahnya Proses Rekrutmen Karyawan

Karyawan terminal adalah pegawai pemerintah yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Daerah. Penempatan pegawai pemerintah pada organisasi pengelolaan terminal tidak melalui proses rekrutmen berdasarkan sebuah kebutuhan kriteria dan kualifikasi orang berdasarkan jabatan. Tidak adanya proses rekrutmen dapat mengakibatkan rendahnya kualitas SDM pengelola terminal.

4. Manajemen Keuangan yang tidak Akuntabel dan Transparan

Manajemen keuangan terminal yang tidak akuntabel dan transparan dalam hal laporan keuangannya. Laporan keuangan tidak dapat diaudit untuk mengetahui berapa potensi pendapatan yang dapat digali dan dikembangkan. Tidak transparannya pengelolaan keuangan mengakibatkan banyaknya kebocoran-kebocoran anggaran

dan pendapatan. Pendapatan terminal ditetapkan berdasarkan sebuah target pendapatan asli daerah (PAD), yang seringkali tidak mempertimbangkan potensi pendapatan terminal berdasarkan hasil kajian terlebih dahulu. Selain itu penetapan target PAD dari pendapatan terminal tidak mempertimbangkan aspek kebutuhan terhadap perawatan fisik sarana dan prasarana dan utilitas terminal.

b. Faktor Eksternal

(1) Kesadaran Wajib Retribusi

Salah satu staf petugas LLAJ (lalulintas dan angkutan) dan Perkeretaapian menjelaskan minimnya kesadaran awak angkutan untuk membayar retribusi dapat mengurangi pendapatan terminal, sedangkan kebutuhan dana untuk perawatan sarana dan prasarana terminal sangat besar. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar kewajibannya, dan masih adanya diskriminasi yang dilakukan oleh para petugas membuat realisasi penerimaan retribusi terminal Kota Palembang tidak sesuai yang direncanakan.

Kemudian menurut Parman salah satu sopir mikrolet bahwa :

“ Saya biasanya tidak membayar karcis, karena itu yang memungut retribusi terminal keponakanku, jadi tidak mungkin dia minta saya kalau hanya uang 3000 rupiah, biarpun saya sepuluh kali lewat tetap tidak bayar “

Kemudian ditambahkan lagi oleh Mullis salah satu sopir angkutan antar kota:

“saya kadang membayar kadang tidak, karena kalau penumpang saya cuma 2 orang, saya bujuk saja itu petugasnya supaya saya tidak bayar, tapi kalau ada 3 orang biasa bayar tapi cuma seribu.”

Mullis melanjutkan bahwa :

“...biasanya petugasnya mau marah, tapi saya marah duluan, jadi tidak dikasi bayara.Saya juga tidak tau dia takut sama saya atau kasihan. Yang jelas saya tidak bayar “

Selanjutnya dibenarkan oleh Hamli selaku petugas pemungut retribusi bahwa :

“iya biasanya kalau sopir mobilnya dikenal ataupun keluarga biasanya dia tidak bayar,langsung saja lewat.terus kalau ada mobil yang sedikit penumpangnya kadang tidak di suruh bayar, karena kita kasihan dia itu keluar untuk mencari nafkah”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, tidak heran jika target penerimaan retribusi terminal tiap tahunnya tidak pernah mencapai target, hal ini karena kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya membayar retribusi, masih melekatnya pengaruh hubungan kekeluargaan yang dilakukan oleh para petugas dan jiwa sosial para petugas yang masih ada, serta sanksi yang tidak ada kepada para pemungut yang melakukan deskriminasi.

(2) Kondisi Objek Penerimaan

Kondisi objek penerimaan di Dinas Perhubungan Kota Palembang khususnya jalan masuk menuju terminal regional masih belum

memadai, dan tempat pemungutan retribusi terminal di Kota Palembang ada 2 yaitu terminal regional dan terminal pembantu.

Sedangkan berdasarkan pantauan penulis, kondisi terminal sudah sangat terbengkalai sehingga terkesan tidak terawat khususnya jalan masuk terminal regional, sesuai dengan yang dikatakan bapak Fahrir bahwa.

“Lokasi terminal membuat sopir angkot malas masuk ke dalam, makanya kami akan melakukan penataan, termasuk jalan, agar lebih nyaman”

Hal lain dikemukakan oleh Darni selaku petugas pemungut retribusi terminal bahwa :

“itu bus selayar tidak masuk ketterminal regional dilangsung ambil jalur lurus, karena kondisi jalan yang belum memadai yaitu banyak lubang-lubang di tengah jalan, jalannya sempit serta banyak tikungan-tikungan yang sulit dilalui bus-bus besar”

“...iya diluar ada juga yang menjaga, tapi mobil-mobil yang mengambil jalur lurus disana tetap dikenakan tarif, namun tetap saja masih banyak mobil yang tidak mau bayar dengan banyak alasan” Lanjut Hamli.

Sedangkan Marlin yang merupakan salah satu seorang sopir angkutan daerah mengatakan bahwa :

“itu kalau saya buru-buru biasanya saya tidak masuk diterminal regional tapi langsung lurus saja, karena jalanannya jelek, banyak lubang, bahkan saya pernah bocor ban mobil ku gara-gara lewat sana. Tapi biasanya diluar juga tetap dikenakan tarif normal”

Lain halnya yang di kemukakan oleh Nasdir selaku kabid Sarana dan Prasarana bahwa:

“Iya memang salah satu yang menjadi kendala pemungutan retribusi terminal itu adalah rusaknya jalan masuk menuju terminal. Namun Insya Allah jalanan itu akan segera diperbaiki, dan semoga

penumpang di pintu keluar terminal yang dapat mengakibatkan antrian kendaraan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

B. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan atas permasalahan yang sebagai berikut :

Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Berdasarkan hasil dari pembahasan dari beberapa faktor penyebab tersebut yang sangat mempengaruhi target penerimaan retribusi terminal di Kota Palembang adalah masih banyaknya bus/trevel, AKAP dan AKDP yang menaik turunkan penumpang dipoll masing-masing di dalam kota dan makin menjamurnya trevel gelap (Angkutan Pribadi), kondisi terminal dalam perbaikan, sehingga pemungutan retribusi dilaksanakan didepan pintu keluar masuk terinal dan penarikan retribusi angkutan barang dipungut di dalam terminal dan tidak masuk kedalam terminal dikarenakan kondisi jalan di dalam terminal banyak yang berlubang.

C. SARAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka timbul suatu saran yaitu sebagai berikut :

Kepada Dinas Perhubungan Kota Palembang :

Dinas Perhubungan Kota Palembang seharusnya lebih memperhatikan dalam menetapkan target penerimaan retribusi terminal setiap tahunnya, dengan memperhatikan realisasi penerimaan sebelumnya sehingga dapat direalisasikan pencapaian target untuk tahun berikutnya.

Kepada Wajib Retribusi :

Wajib retribusi harusnya tidak menghindari pembayaran retribusi, dikarenakan pendapatan daerah yang didapat dari wajib retribusi yang melakukan pembayaran akan digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri dan harusnya wajib retribusi mengerti tentang itu.

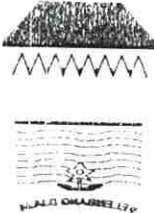
DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syaukani. 2011. **Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur**. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Dwi Rospita Sari. 2015. **Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Lisza Okctarini. 2013. **Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Retribusi Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)**. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Nur Indiantoro dan Bambang Supomo. 2009 **Metode Penelitian Bisnis**. Cetakan 3. BPFY Yogyakarta.
- Sihaan, Marihot P. 2010. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sihaan, Marihot P. 2013. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Cetakan Ketiga. Rajawali Pers. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 **Tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi**. Palembang.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 **Tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah**. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 **Tentang Pendapatan Asli Daerah**.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 **Tentang Pemerintahan Daerah**. Jakarta.

Jadwal Penelitian

Keterangan	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survei Pendahuluan																								
Laporan Survei Pendahuluan																								
Proposal																								
Seminar Proposal																								
Revisi Seminar																								
Pengambilan Data																								
Pengolahan Data Analisis																								
Hasil Penelitian																								
Penggandaan Penelitian																								
Ujian Komprehensif																								
Perbaikan Skripsi																								

Sumber: *Peneliti, 2016*



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 441175 Faksimile : (0711) 442547 Kode Pos 30146
E-mail : dishub_pa_ambang@yahoo.co.id, Website : www.dishub-palembang.go.id

Palembang, 20 Oktober 2015

Nomor : 641/851 /DISHUB/2015
Sifat : Biasa
Maksud :
Tujuan : Izin Penelitian

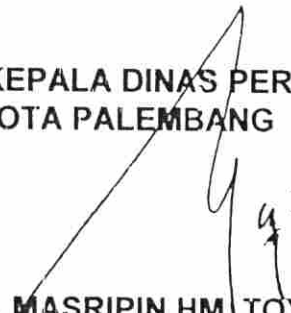
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Univ. Muhammadiyah
di -
Palembang

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 706/H-5/FEB-UMP/X/2015 tanggal 06 September 2015 perihal Izin Penelitian, dengan ini dilaporkan bahwa:

Nama : Rin Hasyim
Nim : 22 2012 062

diizinkan melakukan penelitian dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Palembang namun selama pelaksanaan segala sesuatunya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG**

H. MASRIPIN HM. TOYIB, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590213 198003 1 002



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Rina Hasyim	PEMBIMBING
NIM : 22 2011 062	KETUA : Ida Zuraidah, Hj., S.E, Ak., M.Si
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	15 Jan 2016	BAB I, II, III			Perbaik
2	25 Jan 2016	BAB I, II, III			Perbaik.
3	2 Feb 2016	BAB I, II, III			ACE
4	18 Feb 2016	BAB IV			Perbaik
5	20 Feb 2016	BAB IV			Perbaik
6	1 Maret 2016	BAB IV			Perbaik.
7	3 Mar 2016	BAB IV			ACE
8	4 Mar 2016	BAB IV			Perbaik
9	6 Mar 2016	BAB IV			ACE
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

Program Studi :
Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Islami

Setifikat



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

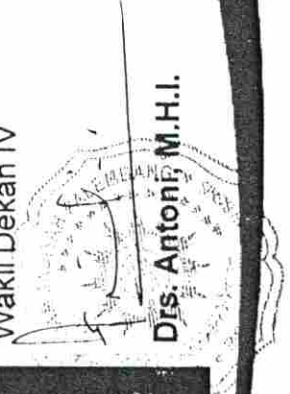
DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : RINA HASYIM
NIM : 222011062
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (21) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 03/2016
Dekan

Wakil Dekan IV





LABORATORIUM KOMPUTER

Nomor : 056/PAK / LAB.. FE UMI /II / 2015

Diberikan Kepada :

N a m a : RINA HASYIM

N i m : 222011062

Tempat Lahir : SALEH AGUNG

Tanggal Lahir : 05 AGUSTUS 1992

Nilai : 75 B AMPLIKASIKAN

Peserta Pelatihan Komputer Akuntansi : GENERAL LEDGER EXCEL DAN MYOB FOR ACCOUNTING, yang dilaksanakan dari bulan SEPTEMBER 2014 sampai dengan DESEMBER 2014 (14 Kali: 28 Jam) bertempat di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.



Palembang Februari 2015





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI



LPKKN

No.509/H-4/LPKKN/UMP/III/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : Rina Hasyim
Nomor Pokok Mahasiswa : 222011062
Fakultas : Ekonomi
Tempat Tgl. Lahir : Saleh Agung, 08-05-1992
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-8 yang dilaksanakan dari tanggal 21 Januari sampai dengan 5 Maret 2015 bertempat di:
Kelurahan/Desa : Ulak Pianggu
Kecamatan : Pampangan
Kota/Kabupaten : Ogan Komering Ilir
Dinyatakan : LULUS



Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.



Alr. Alhanansir, M.Si.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - FAKS. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahc.c.c.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Rina Hasyim
Place/Date of Birth : Saleh, Agung, August 05th 1992
Test Times Taken : +J
Test Date : March, 04th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 47
Structure Grammar : 38
Reading Comprehension : 35
OVERALL SCORE : 400

Palembang, March, 05th 2016

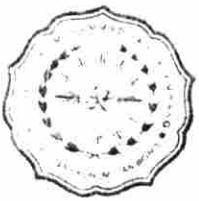
Head of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd., M.A

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 251/TEA FE/LB/UMPA/II/2016

22/07/2016



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI
 INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014
 Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014
 Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011
 Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010

Website: umpalembang.net/feump

Email : feumplg@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Maret 2016
 Waktu : 13.00 s/d 18.00 WIB
 Nama : Rina Hasyim
 NIM : 22 2011 062
 Program Studi : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
 PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
 UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Ida Zuraidah, Hj. S.E, Ak., M.Si	Pembimbing	7 - April 2016	
2	Drs. Sunardi, S.E., M.Si	Ketua Penguji	13 - 04 - 2016	
3	Ida Zuraidah, Hj. S.E, Ak., M.Si	Penguji I	7 - April 2016	
4	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Penguji II	7 - April 2016	

Palembang, Maret 2016
 Dekan
 dan Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, SE, Ak, M, Si
 NIDN/NBM : 0228115802/1021960

BIODATA PENULIS

Nama : Rina Hasyim
NIM : 22 2011 090
Tempat, Tanggal Lahir : Saleh Agung, 05 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Saleh Agung RT/RW 013 / 007
Kec. Air Saleh Kab. Banyuasin
No. Hp : 082281879340
Nama Orang Tua
Ayah : Hariyadi
Ibu : Sri Rahayu
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Tani
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Palembang, Maret 2016

Rina Hasyim